



KUNJUNGI MONUMEN PERS NASIONAL, TINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS



**KOMISI II RDP DENGAN BAPENDA,
OPTIMISTIS PEROLEHAN PAD 2024
MENDATANG MENINGKAT**



Jajaran Prokopim Berau dan PWI Berau foto bersama di depan Monumen Pers Nasional.

KUNJUNGI MONUMEN PERS NASIONAL, TINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS

SURAKARTA - Jajaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Berau bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Berau melakukan kunjungan ke Monumen Pers Nasional pada Rabu (11/10/2023).

Rombongan berangkat dari Kabupaten Berau melalui transportasi udara sekira pukul 08.25 Wita dan tiba di Surabaya pada pukul 10.40 WIB.

Setibanya di Kota Pahlawan, rombongan langsung menuju Kota Surakarta pada pukul 11.00 WIB untuk melakukan kunjungan ke Monumen Pers Nasional.

Cuaca terik menemani perjalanan menuju Surabaya-Solo, namun tak sedikitpun menyurutkan semangat rombongan untuk mengetahui sejarah terbentuknya PWI dan Monumen Pers Nasional.

Ketika tiba di Monumen Pers Nasional, Jalan Gajah Mada, Kota Surakarta, rombongan disambut

dengan hangat oleh para pengurus. Tampak senyuman hangat terpancar di wajah mereka.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, Sekretaris PWI Surakarta, Asep Abdullah, Ketua DKD PWI Surakarta, Anjar Hari Warton, Mewakili Monumen Pers Nasional, Arnain mengarahkan rombongan menuju Ruang Audio Visual.

Di dalam, para pengurus menyajikan video sejarah Gedung Monumen Pers Nasional dan sejarah terbentuknya PWI Surakarta yang diketahui merupakan PWI tertua.

Video pun diputar, tampak raut wajah ingin tahu rombongan Prokopim Berau dengan PWI Berau mengenai sejarah yang ada di Monumen Pers Nasional tersebut.

Banyak hal menarik di dalamnya. Mulai awal mula berdirinya Gedung Monumen Pers Nasional, Alat yang digunakan wartawan

dahulu untuk memperoleh berita, sejarah Radio "Kambing", nama-nama wartawan Jawa dahulu dan banyak hal lagi mengenai dunia pers Indonesia.

Dalam Gedung Monumen Pers Nasional, di gedung utama terdapat patung-patung wajah wartawan Jawa dahulu, Societeit Mangkunegaran dari Masa ke Masa, Cetakan Koran dahulu dan lainnya.

Selain itu, terdapat Ruang Mangkunegaran, Ruang Peresmian Monpers, Ruang Sejarah Pers Surakarta dan Ruang Pamer Sejarah Pers.

Lanjut ke lantai dua, ada Ruang Rekam Sejarah Pers, Ruang Perpustakaan, Ruang Kemala serta Ruang Digitalisasi.

Seluruh perkembangan pers dipaparkan kepada rombongan. Mulai dari awal terbitkan koran cetak hingga e-paper yang muncul di era digitalisasi seperti saat ini.

Lanjutan UTAMA



Penyerahan Plakat dari Kabag Prokopim Berau, Sunarto.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul menuturkan, perjalanan Pers di Indonesia dimulai di Solo, yang dokumentasinya masih tersimpan rapi di Monumen Pers Nasional.

"Pergerakan sejarah perjalanan Pers Indonesia pada tahun 1946 lahir dari tempat ini," ungkapnya.

Anas menjelaskan, koleksi yang dimiliki Monumen Pers adalah bukti penting dari semua media yang didokumentasikan dengan rapi dan terawat di museum tersebut.

"Sampai saat ini sudah beberapa juta halaman koran yang sudah di digitalkan dari ribuan koleksi koran di Monumen Pers," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk penerbitan pers bisa mengirimkan bukti terbitnya ke Monumen Pers agar dapat didokumentasikan dan menambah koleksi museum.

Lanjutnya, awal mula pergerakan Pers di Indonesia ditandai dengan hadirnya wartawan dari berbagai daerah ke Solo untuk mendeklarasikan Persatuan Wartawan Indonesia.

"Bangunan ini adalah saksi sejarah dan menjadi cagar budaya. Bangunan sejak awal dirancang modern fasilitasnya seperti ada helipadnya di rooftop atas. Dulu di atap atas juga menjadi tempat semedi Pak Harmoko (Menteri Penerangan era Presiden Soeharto)," jelasnya.

Sementara, Kepala Bagian Prokopim Berau, Sunarto menyampaikan terima kasih kepada jajaran PWI Surakarta dan pengurus Monumen Pers Nasional karena berkenan menerima kunjungan PWI Berau dengan Prokopim Berau.

"Ini adalah bentuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para Jurnalis Berau," tuturnya.

Dirinya menerangkan, pers merupakan pilar ke-4 demokrasi yang kebebasannya dilindungi undang-undang. Sehingga sudah semestinya, insan pers menjadi media penyampaian setiap aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, yang tentu saja diharapkan memahami tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kode etik jurnalistik yang berlaku.

"Sehingga berita yang disajikan harus mengedepankan fakta, bukan kebohongan atau hoaks," tegasnya.

Sunarto berharap, insan pers agar taat terhadap etik jurnalistik, yang bukan semata mengejar atensi publik dengan sajian berita yang sekadar heboh atau click bait, terutama bagi media online yang menawarkan kecepatan.

"Saya ingin kemitraan Pemkab Berau dengan seluruh media dapat terus terjalin. Besar harapan saya rekan-rekan menjadi corong informasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat," tandasnya. (dez)



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya.

KOMISI II RDP DENGAN BAPENDA, OPTIMISTIS PEROLEHAN PAD 2024 MENDATANG MENINGKAT

TANJUNG REDEB - Komisi II DPRD Berau menggelear Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Selasa (10/10/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menuturkan, rapat itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 mendatang.

"Dalam rapat tersebut, pihak Bapenda sudah memaparkan kepada kami bagaimana target mereka mengenai peroleh PAD kita di tahun depan," jelasnya kepada sejumlah awak media.

Dirinya mengungkapkan,

setelah melihat pemaparan Bapenda, pihaknya menyepakati dan mengaku optimistis perolehan PAD pada tahun 2024 akan meningkat.

"Bapenda menargetkan PAD kita kurang lebih mencapai Rp 200 miliar. Untuk per September 2023 ini, target sudah menyentuh angka 81 persen," paparnya.

Wendy juga menyebut, dalam RDP itu Bapenda menyampaikan beberapa kendala yang terjadi. "Seperti masalah saat penagihan dan yang lainnya," imbuhnya.

Dirinya menjelaskan, enam sektor sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi dan laba

dari BUMD serta lainnya. Wendy menyampaikan, salah satu sumber perolehan PAD terbaru dari retribusi sarang burung walet.

"Mereka memiliki berbagai macam tantangan dalam memaksimalkan Perolehan PAD tersebut," ucapnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini berharap, Bapenda sebagai mitra Komisi II DPRD Berau bisa terus berkolaborasi untuk mencapai perolehan PAD untuk Kabupaten Berau semaksimal mungkin.

"Tentunya harapan kita PAD ini bisa disalurkan kembali untuk masyarakat Kabupaten Berau," tandasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

MINTA BONUS ATLET SEGERA DIREALISASIKAN, SUBROTO: ITU HAK MEREKA

TANJUNG REDEB - Belum kunjung cairnya bonus atlet berprestasi pada perheletan Porpov VII Kaltim beberapa waktu lalu menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

Dirinya membeberkan, beberapa waktu lalu jajaran Komisi III DPRD Berau sudah melakukan rapat pertemuan dengan KONI guna membahas bonus atlet.

"Kami (Komisi III, red) sudah mendesak bonus untuk atler segera direalisasikan, karena itu hak mereka yang sudah beprestasi," ungkapnya.

Dia menyebut, dalam APBD Perubahan tahun 2023 ini seluruh bonus atlet sudah terselesaikan. "Saya harap bisa segera dicarikan," katanya.

Politikus Golkar ini meminta ke depannya, anggaran yang sudah ditetapkan dapat digunakan untuk peningkatan cabang olahraga (Cabor).

"Jadi setelah berprestasi tidak menunggu lagi anggaran perubahan atau anggaran baru. Itu harapan kami ke depan ya," ungkapnya.

Pihaknya selaku Komisi III DPRD Berau juga sudah berulang kali sampaikan kepada KONI, agar konsisten beri perhatian menyeluruh kepada cabor.

"Yang kami harapkan seluruh cabor dinaungan KONI Berau ini bisa meraih prestasi di kancah nasional. Kemudian soal anggaran untuk cabor kami selalu support dan lakukan pengawasan," pungkasnya. (adv/dez)



SEBANYAK 12 DESA DI PPU IKUTI PELATIHAN PERAKITAN ALAT PEMANEN AIR HUJAN



**PROGRES LAMBAN, SATU KONTRAKTOR
JALAN DIPUTUS KONTRAK**



Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Gedung Serbaguna Petung, Rabu (11/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

SEBANYAK 12 DESA DI PPU IKUTI PELATIHAN PERAKITAN ALAT PEMANEN AIR HUJAN

PPU - Sebanyak 12 kelurahan/desa di Penajam Paser Utara (PPU) menerima pelatihan sebuah inovasi. Yakni pelatihan perakitan alat panen hujan.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun membuka secara resmi sosialisasi dan pelatihan perakitan alat pemanen air hujan, Rabu (11/10/2023). Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU dalam rangka peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim (Proklim) 2023.

Digelar di Gedung Serbaguna kelurahan Petung, Makmur memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut. Dirinya berharap setelah melalui pelatihan ini 12 desa dan kelurahan ini mampu menjadi percontohan perakitan alat pemanen air hujan bagi desa lainnya di PPU.

"Sosialisasi dan pelatihan ini penting dilaksanakan agar perangkat desa maupun kelurahan yang mengikuti kegiatan ini lebih memahami. Saya berharap 12 desa ini bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya di kabupaten PPU," katanya.

Sementara itu Kepala DLH PPU, Tita Deriyati menjelaskan proklim merupakan sebuah gerakan nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Proklim juga merupakan kegiatan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi.

Meliputi kegiatan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat di tingkat tapak. "Kegiatan adaptasi dan mitigasi Proklim merupakan kegiatan di masyarakat dilakukan sehari-hari, dilengkapi dengan kelembagaan yang ada," ujar dia.

Semisal pemilahan sampah, composting, pemanfaatan lahan perkarangan, perlindungan sumur dan mata air. Kemudian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penggunaan energi baru terbarukan, penggunaan pupuk organik.

Kegiatan kali ini merupakan salah satu dari adaptasi proklim dengan tujuan agar masyarakat di 12 kelurahan/desa dapat mengetahui cara pemanfaatan air hujan. Dengan melalui teknologi filterisasi, hingga menjadi air bersih yang layak untuk diminum langsung.

"Secara umum Kami berharap kegiatan Proklim dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat," tutup Tita. (SBK)



Kepala Dinas PUPR PPU, Riviana Noor. (Robbi/MediaKaltimGroup)

PROGRES LAMBAN, SATU KONTRAKTOR JALAN DIPUTUS KONTRAK

PPU - Satu proyek pekerjaan jalan di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) disetop. Alasannya karena progres pengerjaan pembangunan yang dinilai lamban.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU tengah melakukan satu pemutusan hubungan kerja dengan salah satu kontraktor. Dalam proyek untuk pengerjaan proyek jalan di Babulu.

Kepala Dinas PUPR PPU, Riviana Noor menjelaskan pemutusan hubungan kerja itu pada bulan Oktober ini. Kini sedang proses administrasi untuk pemutusan tersebut.

"Kita sekarang masih dalam proses klaim. Nanti kalau sudah klaim selesai kita akan lapor ke BPK baru bisa di ekspos ya," kata dia, Rabu (11/10/2023).

Setelah selesai administrasi, hasilnya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Riviana menegaskan, penyebabnya ialah progres pengerjaan yang lambat. Pada

pengerjaan peningkatan jalan itu sekira 1.6 kilometer, hingga September baru mencapai 10 persen.

Sedangkan untuk anggaran yang direncanakan hanya sekitar Rp 6 miliar. "Cuma produknya rigid, anggaran cuma 6 miliar cuman karena rekanannya tidak siap, jadi sampai dengan akhir kontrak progresnya sangat kecil. Setelah kita evaluasi ya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan," jelasnya.

Lebih lanjut, setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas PUPR, permasalahan terjadi secara internal perusahaan proyek tersebut. Namun perusahaan tersebut sempat membantah karena kesulitan material.

"Setelah Kami evaluasi, tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Masalahnya non teknis. Kalau kita evaluasi, alasannya non teknis kalau alasan kontraktor ya, masalah kelangkaan material dan sebagainya. Kalau evaluasi kami ya dari management," tutup Riviana. (SBK)



KEBAKARAN DI SMELTER NIKEL, SATU WNA ALAMI LUKA BAKAR SERIUS



**Sedang Pasang Rakang di Empang,
Salman Diduga Diterkam Buaya**



KEBAKARAN DI SMELTER NIKEL, SATU WNA ALAMI LUKA BAKAR SERIUS

TENGGARONG - Seorang Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan salah satu pekerja di Pabrik Smelter Nikel, di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, menjadi korban dalam insiden kebakaran.

Identitas lengkap WNA tersebut masih belum diketahui, dan saat ini dia sedang menjalani perawatan medis di Puskesmas Pendingin.

"Alhamdulillah, beliau masih dalam keadaan hidup, dan saat ini dalam perjalanan menuju Rumah Sakit AWS di Samarinda," ujar Rahmat Hidayat, Lurah Pendingin, pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Korban diperkirakan mengalami luka bakar yang mencakup sekitar 50 persen

dari tubuhnya ketika terjebak dalam kebakaran yang terjadi di salah satu gedung Pabrik Smelter Nikel di Kelurahan Pendingin.

Lebih tepatnya, insiden ini terjadi di dalam gedung boiler pembakaran batu bara, yang merupakan sumber energi utama di smelter tersebut.

Namun, Rahmat, belum bersedia memberikan komentar lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran hingga membakar bagian gedung. "Saat ini, kami masih belum dapat memastikan penyebab pastinya," tutup Rahmat.

Penulis: Muhammad Rafi'i

Editor: Agus Susanto



Korban Bertambah, 1 Orang Tewas Terjebak di Kebakaran Smelter Nikel Sangasanga

TENGGARONG - Kebakaran yang terjadi di Smelter Nikel milik PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) memakan korban jiwa. Setelah sebelumnya seorang Warga Negara Asing (WNA) yang terjebak dalam kobaran api, mengalami luka bakar serius dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Petugas kembali menemukan satu korban meninggal dunia, di lokasi kebakaran.

"Ada yang meninggal pak setelah pembersihan lokasi, ada mayat ditemukan 1 orang," ujar Lurah Pendingin, Rahmat Hidayat, Rabu (11/10/2023).

Kondisi jasad yang ditemukan pun sangat memprihatikan. Hingga membuat jasad

tersebut tidak dikenali identitasnya untuk sementara. Namun saat ini, jasad tersebut sudah dievakuasi dan dibawa ke Samarinda. "Jasad sudah dievakuasi, paling ke RS AWS pak," tutup Rahmat.

Diketahui, Smelter Nikel yang berada di Kelurahan Pendingin, Sangasanga, ini diresmikan pada September lalu tersebut alami kebakaran hebat. Tepatnya di bagian gedung penampungan batu bara, yang juga menjadi lokasi pembakaran batu bara. Dari pantauan video yang beredar di medsos, sebanyak 3 lantai alami kebakaran. Yang diperkirakan dimulai sejak pukul 17.30 WITA.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Salman (18), pemuda Kecamatan Sangasanga yang diduga diterkam buaya. (Istimewa)

Sedang Pasang Rakang di Empang, Salman Diduga Diterkam Buaya

TENGGARONG - Nasib malang menimpa Salman (18), pemuda asal Kecamatan Sangasanga, diduga diterkam buaya saat sedang mencari kepiting di perairan kecil Kelurahan Sangasanga Dalam. Tepatnya di RT 11, pada Rabu (11/10/2023). Diperkirakan Salman diterkam sekitar pukul 12.00 Wita.

Kakak korban, Sumi, membenarkan kejadian naas tersebut. Saat kejadian, korban bersama adik iparnya, Angga, memang sedang melakukan aktivitasnya dengan memasang rakang. Saat itu, korban yang berada di atas perahu kecil turun ke dalam perairan untuk menaruh jebakan rakang. Namun tidak lama, tubuh Salman langsung ditarik ke dalam sungai oleh buaya.

"Kalau kakak iparnya (Angga) terlempar

dari perahu kecil, saat buaya menarik tubuh Salman," ungkap Sumi saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (11/10/2023).

Melihat Salman yang sudah menghilang karena diduga ditarik buaya, Angga pun bergegas kembali ke rumah dan memberitahunya kepada orang tua korban. Lantas, keluarga korban pun langsung menuju lokasi kejadian diduga Salman diterkam buaya untuk melakukan proses pencarian. Dibantu oleh masyarakat sekitar dan Satpolairud Polres Kukar.

"Pencarian masih dilakukan sama warga sekitar, keluarga dan polisi. Memang pekerjaannya sehari-hari mencari kepiting," tutup Sumi.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Rafi'i/Media Kaltim)

Buka Pekan Inovasi dan Kreativitas, Bentuk Reformasi Birokrasi Perubahan

TENGGARONG - Pekan Inovasi dan Kreativitas tahun 2023 di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Setkab Kukar), resmi dibuka oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Rabu (11/10/2023) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar. Turut hadir seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan di Kukar.

Edi Damansyah menjelaskan setiap OPD, kecamatan hingga kelurahan dan desa mampu menciptakan program inovasi. Agenda inilah dianggap menjadi dorongan, untuk bisa menciptakan reformasi birokrasi perubahan.

"Ini bagian dari perbaikan inovasi lah di Kukar," ujar Edi Damansyah.

Dilanjutkan Edi, nantinya setiap inovasi yang diciptakan, akan dinilai secara independen. Inovasi mana saja yang sudah sesuai dengan kaidah. Dan nantinya mendapa-

tkan predikat terbaik ditingkat kabupaten. Untuk kemudian diikutsertakan di tingkat provinsi dan nasional.

Terbukti, banyak inovasi yang sudah dilakukan jajaran Pemkab Kukar yang berhasil menyabet penghargaan di provinsi hingga nasional. Seperti sebelumnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar yang berhasil menyabet peringkat pertama di tingkat Kaltim dalam digitalisasi pelayanan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juga beberapa inovasi yang berhubungan dengan sektor pertanian, kemudahan. Tidak sedikit yang sudah mencapai level nasional.

"Bingkai besarnya reformasi birokrasi perubahan, jadi sistemnya birokrasi perubahan terus dilakukan inovasi," tutup Edi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Kades Batuah, Abdul Rasyid. (Istimewa)

Tingkatkan Kapasitas Ketua RT, Desa Batuah Gelar Bimtek Tata Kelola Administrasi

TENGGARONG - Peningkatan kapasitas ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Batuah terus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) dalam hal pengelolaan administrasi. Sebanyak 49 ketua RT dari 10 dusun, mengikuti rangkaian bimtek yang digelar di Hotel Maxone Balikpapan, Minggu (8/10/2023) lalu.

Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid, dalam rangka bimtek ini, seluruh ketua RT bisa lebih serius lagi dalam menjalankan tata kelola administrasinya dengan lebih baik lagi. Terutama dalam hal melayani warganya.

"Mari kita buktikan dengan bekerja dengan kinerja baik. Terus jaga kekompakan dan kebersamaan untuk tegak lurus mendukung Program Dedikasi Kukar Idaman," ungkap Rasyid.

Bimtek ini pun menjadi suatu gerakan bersama, agar apa yang dilakukan ketua RT bisa berjalan bersama. Tidak ada ketua RT yang tertinggal dalam hal tata kelola administrasinya. Dapat memaksimalkan sistem kerja, dengan harapan bisa sejalan memaksimalkan pelayanan di masing-masing RT.

Banyak hal yang menjadi tugas ketua RT. Utamanya dalam hal pengelolaan program Rp 50 juta per RT. Selain itu juga, bagaimana mampu memahami tata kelola Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD). Ketika para ketua RT mampu menjalankan itu semua dengan baik, diyakini dampaknya terhadap warga sangat dirasakan.

"Intinya, semuanya harus lebih baik," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

Dapat Jatah DBH Sawit, Dimanfaatkan untuk Infrastruktur Kelapa Sawit Milik Rakyat

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendapatkan jatah dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dari pemerintah pusat. Dana ini disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama 9 kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.

Kukar sendiri mengantongi DBH kelapa sawit sebesar Rp 19,7 miliar. Di bawah Kutai Timur (Rp 37,4 miliar), Berau (Rp 20,5 miliar) dan Paser (Rp 20,3 miliar). Kemudian Kutai Barat (Rp 17,8 miliar), Samarinda (Rp 11,8 miliar), PPU (Rp 11,6 miliar), Mahakam Ulu (Rp 8,7 miliar), Bontang (Rp 7 miliar) dan Balikpapan (Rp 6,9 miliar).

Sementara untuk Pemprov Kaltim mengantongi Rp 45 miliar, sehingga total Kaltim mendapatkan jatah Rp 205,5 miliar dari pemerintah pusat.

"Di dalam pedoman Peraturan Menteri

Keuangan (Permenkeu) sudah jelas penggunaannya, itu ada aturan penggunaannya," ungkap Edi Damansyah, bupati Kukar, belum lama ini.

Edi melanjutkan, anggaran DBH tersebut akan digunakan untuk pembangunan di kawasan kebun sawit, terutama kawasan kelapa sawit milik rakyat. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan kawasan sawit yang berada di kecamatan penghasil kelapa sawit.

Dengan mengerahkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar untuk pembangunan jalan utamanya, sementara jalan-jalan sekunder berupa blok-blok akan dikerjakan oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar. "Yang pasti kami fokuskan untuk infrastruktur perkebunan rakyat sesuai pedomannya," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



RESMI DIBUKA, CINEMA XXI HADIR DI BONTANG CITIMALL

BACA HALAMAN A2

**Bocah Selambai Digigit
Buaya, 12 Jahitan di
Punggung dan 1 di Hidung**





Peresmian Cinema XXI di Bontang Citimall (Syakurah/Radarbontang)

Resmi Dibuka, Cinema XXI Hadir di Bontang Citimall

BONTANG - Peresmian Bioskop Cinema XXI di Bontang Citimall telah dilaksanakan, Rabu (11/10/23). Suprayitno, Head of Government Relations Cinema XXI Bontang berkomitmen untuk menghadirkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menonton film, termasuk membuka bioskop di daerah-daerah yang berpotensi.

"Selama ini masyarakat Bontang harus menempuh jarak 120 km ke Samarinda, dengan hadirnya XXI di Citimall bisa menjadi tempat keluarga atau sahabat untuk melakukan kegiatan sosial bersama," jelasnya.

Perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga terlaksana, karena melibatkan warga Bontang menjadi tenaga kerja di sana. Cinema XXI di Bontang Citimall hadir dengan 4 studio, dan total 838 seat yang tersedia di total 4 studio tersebut.

Wali Kota Bontang, Basri Rase berterima kasih atas masuknya investasi untuk membantu perkembangan ekonomi kreatif di Kota Bontang. Ini merupakan cerminan pesatnya perkembangan ekonomi di Bontang.

Dibukanya bioskop baru Cinema XXI di berbagai lokasi, termasuk Citimall Bontang XXI lahir dari antusiasme masyarakat Indonesia untuk kembali menonton film di bioskop pasca pandemi. Antusiasme tersebut sejalan dengan kembali menggeliatnya industri perfilman nasional yang turut menghadirkan lebih banyak film-film berkualitas anak bangsa.

"Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk merayakan keberhasilan dan pertumbuhan kota tercinta dan pada 12 Oktober besok, kita akan merayakan hari ulang tahun ke-24 Kota Bontang," ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai. (ist)

Pondasi Masjid Terapung Ditabrak Perahu Nelayan, Pemkot Diminta Pasang Pagar Pembatas

BONTANG – Masjid Terapung Darul Irsyad Selambai, Loktuan, kurang mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Hal itu terbukti dengan kurangnya fasilitas pada masjid yang telah diresmikan dan difungsikan pada awal Maret 2022 lalu.

Hal itu disayangkan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Faisal.

Disebutkan Faisal, salah satu yang perlu diperhatikan dari Masjid Terapung ini adalah, tidak adanya fasilitas pengaman pagar pembatas di bagian bawah masjid.

Belum adanya fasilitas pengaman seperti pagar pembatas bagian bawah, dinilai Faisal bisa membahayakan. Sering menyebabkan perahu nelayan yang kerap melintas, membentur pondasi masjid di bagian bawah. Apalagi saat malam hari.

"Masyarakat di sana mayoritasnya nelayan, ini harus diperhatikan. Karena ada bagian yang sempat tertabrak perahu nelayan pas malam hari. Kalau ada pengamanannya kan lebih aman para nelayan, konstruksi masjid juga lebih tahan lama," tandasnya. (al/adv)



Ilustrasi lapak di pasar. (ist)

Legislatif Minta Oknum Bermain Lapak Ditindaklanjuti

BONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menyebut bahwa lapak-lapak yang berada di pasar-pasar tradisional Bontang saat ini adalah milik pemerintah daerah, bukan pribadi. Sehingga tidak diperbolehkan menyalahgunakannya secara individu.

Hal itu diungkapkannya saat mengomentari adanya dugaan oknum memainkan lapak pasar. Lantaran banyak terdapat keluhan yang mengatakan bahwa take over (ambil alih lapak) di pasar harganya sangat mahal.

Dikatakan Politisi Partai Golkar tersebut, tidak ada aturan soal take over lapak di pasar. Sebab, kios pasar yang dimiliki oleh para pedagang adalah milik pemerintah daerah setempat dan bukan milik pribadi pedagang.

"Sebenarnya itu tidak ada aturan soal take over. Bisa saja ada oknum, yang menempati saat ini jual Rp 10 juta, padahal dari pemerintah harganya Rp 1 juta misalnya," tegasnya.

Karenanya dengan adanya info dugaan penyalahgunaan lapak tersebut, dirinya meminta OPD terkait untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jangan sampai masalah ini terus berlarut.

"Maka itu saya setuju untuk segera ditindaklanjuti," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa para pedagang di pasar tradisional mengeluhkan soal mahalnya biaya balik nama (take over) lapak di dalam pasar. Alhasil banyak pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono beberapa waktu lalu. Dirinya kerap mendapat keluhan dari pedagang terkait take over lapak.

"Kata pedagang harga balik nama lapak kosong yang mau ditempati pedagang lain, biayanya terlalu tinggi. Sampai-sampai ada yang Rp 10 juta," ujarnya. (al/adv)



Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam. (ist)

Ketua DPRD Harap Pj Gubernur Kaltim Perhatikan Kabupaten/Kota Secara Adil

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam mengapresiasi ditunjuknya Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menggantikan Isran Noor yang menjabat sebelumnya.

Dengan dipilihnya Akmal, dirinya meminta agar Pj Gubernur Kaltim tersebut dapat menjalankan program-program yang ada dengan baik.

Ia juga meminta agar dapat memperhatikan kabupaten/kota di seluruh wilayah Kaltim dengan adil. Sehingga perhatian tersebut dapat merata di seluruh wilayah.

“Keadilan itu terutama pada bantuan-bantuan seperti keuangan dan lain sebagainya,” ujarnya singkat.

Dirinya juga mengharapkan agar ada sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota. Sehingga dengan sinergi tersebut dapat mempercepat kemajuan pembangunan di daerah-daerah.

Saat ditanya mengenai kompetensi Akmal, Andi Faiz sapaan akrabnya menyebut kompetensi Akmal sudah sangat mumpuni untuk memimpin Kaltim. Lantaran Akmal memiliki segudang pengalaman yang mumpuni di

bidang pemerintahan. Akmal adalah seorang birokrat sarat pengalaman yang bertugas di bawah Kementerian Dalam Negeri.

“Kompetensinya tidak perlu diragukan lagi,” imbuhnya.

Diketahui, Karir Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik terbilang cukup cemerlang semenjak ia memulai karirnya di Kemendagri pada 1996 yang lalu.

Akmal Malik pernah bertugas di Kanwil Kemendagri Provinsi Aceh sebagai Kabag Tata Usaha dan kepegawaian pada 2005 - 2008, dan dilanjutkan pada 2008 - 2012 menjabat sebagai Sekda Kabupaten Aceh Singkil.

Karirnya terus melejit hingga akhirnya pada 2019 ia menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Pada 13 Mei 2022 Akmal Malik ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulawesi barat oleh Mendagri Tito Karnavian menggantikan Gubernur Muhammad Ali Baal Masdar yang habis masa jabatannya.

Dengan bekal pengalaman itulah ia dipercaya untuk menggantikan jabatan Isran Noor sebagai Gubernur Kaltim saat ini. (al/adv)



Foto: Bhabinkamtibmas Loktuan, Aipda Bambang Sumantri (berdiri) bersama keluarga korban saat menemani korban di rumah sakit. (ist)

Bocah Selambai Digigit Buaya, 12 Jahitan di Punggung dan 1 di Hidung

BONTANG – Keganasan buaya di perairan sekitar Bontang kembali memakan korban. Kali ini seorang bocah berusia sekira 10 tahunan harus menjadi korban gigitan buaya, Rabu (11/9/2023) sore tadi.

Penerkaman buaya itu tepatnya terjadi di RT 05, Selambai, Kelurahan Loktuan Rabu sore sekitar pukul 16.30 wita.

Bhabinkamtibmas Loktuan, Aipda Bambang Soemantri menjelaskan kronologis kejadian. Sore itu korban berinisial F berenang bersama teman-

nya di perairan di kolong rumahnya. Tiba-tiba saat berenang itu ada buaya yang panjangnya sekira 3 meter menerkam korban dari belakang.

"Korban tidak mengetahui kemunculan buaya tersebut. Saat itu mereka sedang berenang dan main-main dengan gabus box ikan," ujarnya.

Mengetahui keponakannya digigit buaya, sang paman segera memberikan bantuan dengan cara berteriak-teriak dan memukul-mukul tiang rumah dengan kayu. Cara itu digunakan untuk membuat keramaian agar buaya

segera melepas gigitannya dan pergi dari situ.

"Cara itu berhasil. Buaya melepas gigitannya dan pergi," imbuhnya.

Korban segera dilarikan ke RS PKT. Korban mendapat 12 jahitan di punggung sebelah kanan, satu jahitan di hidung, dan luka di pelipis kiri.

"Kondisi korban sudah membaik hanya mengalami shock saja dengan kejadian itu. Sekarang F sudah dipulangkan untuk rawat jalan," pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam



Kepala Dispopar Bontang Ahmad Aznem. (Syakurah/Radarbontang)

Kadispopar Revisi Pembagian Bonus Pelatih di Porprov VII Berau

BONTANG – Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem menjelaskan adanya kesalahan perhitungan pencairan bonus pelatih cabor peraih medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII di Berau tahun 2022 lalu.

Dijelaskannya, akan ada revisi besaran bonus yang akan diberikan. Perhitungan besaran bonus akan ditambah Rp 1,7 miliar. Sementara itu manager dan official nilai besaran uang tetap sama seperti yang ada dalam surat keputusan persetujuan pencairan.

"Anggaran ini tentu tidak bisa diberikan langsung karena dana tahun ini terbatas, jadi anggaran tambahan itu bakal diberikan pada tahun 2024.

Setelah direvisi, bonus ini akan dihitung berdasarkan persentase, dan hal ini pun sudah dibicarakan dengan DPRD Bontang.

Rinciannya, medali emas pertama akan

mendapat bonus Rp 30 juta. Untuk cabor mendapat lebih dari satu emas, medali kedua akan dihitung 50 persennya atau Rp 15 juta. Untuk medali emas di atas 3 atau lebih akan dihitung nominal bonus sebesar 20 persen atau Rp 6 juta.

"Untuk medali perak, bonusnya sebesar Rp 25 juta. Perhitungannya juga sama. Sementara untuk nominal medali perunggu pertama diberikan bonus senilai Rp 12 juta, perhitungannya akan begitu seterusnya," jelasnya.

Perhitungan ini dinilai ideal, dan menurut SK pelatih hanya ada 1. Jika pelatih lebih dari itu. Bonus perlu mereka bagi tentunya.

"Insyaallah malam ini atau besok para atlet sudah akan menerima bonus di rekening mereka," jelasnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



Kegiatan pemeriksaan urine dadakan di Rujab Wali Kota Bontang. (Ist)

Puluhan ASN Bontang Tes Urine Dadakan

BONTANG – Pasca deklarasi Pancasila dan penandatanganan MOU di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (11/10/23), pihak Kesbangpol melakukan tes urin dadakan kepada para ASN yang hadir.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bontang (BNNK), Lulyana Ramadhani menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari pihak Kesbangpol.

"Kami dari BNN hanya memfasilitasi dan melakukan tes urine kepada ASN yang hadir," jelasnya.

Disebutkannya, tes urine dadakan

seperti ini akan selalu diadakan di Kota Bontang, agar siap tidak siap semua ASN dapat terjangkau.

"Kalau dibikinkan jadwal nanti ada yang mempersiapkan diri atau bahkan ijin," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sigit Alfian menjelaskan, karena Kota Bontang menjadi Kota Pancasila maka cara mengindikasinya tentu dengan masyarakat yang bebas dengan narkoba.

"Ketua harian P4GN adalah Kepala Kesbangpol, oleh sebab itu saya akan

terus melaksanakan tes urine dadakan," ujarnya.

Tes urine dadakan ini akan dilaksanakan sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai seluruh ASN di Kota Bontang terjangkau.

Terdapat total 47 ASN. Terdiri dari 33 laki 14 perempuan termasuk sekretaris daerah dan para kepala dinas. Hasil seluruhnya negatif.

"Yang belum dites akan didatangi dan rahasia waktunya. Karena ini termasuk tugas sebagai ketua harian," tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



KOMISI II RDP DENGAN APEM DAN POL PP, POMINI DIIZINKAN BERJUALAN SEMENTARA WAKTU



**UNIVERSITAS MULIA AUDENSI KE
KOMISI III DPRD BALIKPAPAN, BAHAS
PERMASALAHAN DAS AMPAL**



RDP Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Satpol PP dan Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Kota Balikpapan.

KOMISI II RDP DENGAN APEM DAN POL PP, POMINI DIIZINKAN BERJUALAN SEMENTARA WAKTU

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Kota Balikpapan. RDP ini untuk mencari solusi terkait penertiban penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran khususnya penjual Pom Mini.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengatakan, bahwa sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku keberadaan Pom Mini ini sebenarnya memang melanggar aturan.

Meski demikian, harus juga memikirkan perekonomian para pemilik usaha Pom Mini yang selama ini banyak membantu masyarakat yang kesulitan dalam menghadapi padatnya antrian di SPBU.

"Kami dari Komisi II, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan membiarkan dulu Pom Mini ini tetap berjualan, sembari mereka melakukan kajian dan menentukan regulasi juga sambil berkoordinasi dengan pihak Pertamina," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, akan ada Surat Edaran (SE)

dan imbauan dari Satpol PP, melalui komunitas APEM. "Jadi permasalahan ini sudah clear, bukan dibiarkan tapi nanti akan ada syarat-syarat yang akan diterapkan," jelasnya.

Taufik menegaskan, pihak Komisi II meminta adanya kajian dan koordinasi dengan Pertamina terkait dengan regulasi undang-undang dari pusat. Disisi lain keberadaan Pom Mini ini membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM karena padatnya antrian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Apalagi ini juga menyangkut dengan piring nasi mereka, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Harus ikuti aturan dengan tidak mengesampingkan para pelaku Pom Mini ini," tambahnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Budi Liliono masih menunggu regulasi yang akan dibuat termasuk koordinasi dengan OPD lain tentang bagaimana keberlanjutan dari masalah tersebut.

Menurutnya, para pengusaha Pom Mini dilarang untuk berjualan di kawasan jalan protokol dan tidak boleh bertambah jumlah penjualannya.

"Untuk di daerah juga ada

aturan untuk mengatur, tempat-tempat mana yang diperbolehkan untuk kegiatan jual beli. Kita akan mengkaji ulang tempat mana yang diperbolehkan, dengan catatan mereka jumlahnya tidak bertambah, dan tidak berjualan di jalan protokol," ujarnya.

Budi menambahkan, akan ada Surat Edaran atau Perwali yang akan mengatur keberadaan Pom Mini ini, sambil berkoordinasi dengan OPD yang lain seperti Dinas Perizinan dan BPBD.

Sementara Ketua APEM Balikpapan, Harianto menyebut mereka dibolehkan berjualan sambil menunggu aturan atau ketentuan yang akan dikeluarkan Pemerintah Kota, namun dengan catatan menjaga keamanan dan menyiapkan alat safety, minimal alat pemadam api ringan (APAR) atau pasir untuk mencegah adanya kebakaran atau adanya percikan api.

"Kami berharap aturan yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan segera keluar, supaya kami usahanya lebih nyaman dan Pom Mini di Balikpapan tidak tumbuh semakin banyak. Kalau dibiarkan bisa tembus ribuan unit," ujarnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Mahasiswa Universitas Mulia saat medatangi Komisi III DPRD Balikpapan.

UNIVERSITAS MULIA AUDENSI KE KOMISI III DPRD BALIKPAPAN, BAHAS PERMASALAHAN DAS AMPAL

BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Kota Balikpapan menerima audensi puluhan mahasiswa dari Universitas Mulia Balikpapan di Ruang Komisi III DPRD Balikpapan. Kedatangan puluhan mahasiswan ini disambut Seketaris Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim didampingi anggota Komisi III DPRD Balikpapan Mieke Henny, Nurhadi Saputra, Suwarni, Jafar Sidik.

Dari audensi ini, Kamaruddin Ibrahim menyampaikan, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum ke kantor DPRD Balikpapan ingin mempertanyakan aspek hukum dan permasalahan DAS Ampal.

"Di sini kami jelaskan bagaimana tugas dan tupoksi dari DPRD, berkaitan dengan anggaran, pengawasan dan lain sebagainya," ujarnya, Rabu (11/10/2023).

Lebih lanjut Kamaruddin Ibrahim menjelaskan, dalam hal pengawasan DPRD bukan mengawasi hal-hal yang mikro.

Tetapi lebih pengawasan perkara makro. Misalnya, jika ada kontraktor yang lambat dan mengalami deviasi, tentu DPRD akan turun.

"Jadi kami enggak ngawasi jumlah materialnya, supaya mereka paham," jelasnya.

Di pertemuan ini, mahasiswa lebih kritis menanggapi perihal masalah hukum DAS Ampal. Tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena DPRD bekerja berdasarkan kolektif kolegal, sehingga tidak bisa mengambil keputusan sendiri.

"Karena yang berkaitan dengan operasional itu urusan dari eksekutif, legislatif hanya mengawasi secara umum. Kami bicara sesuai tugas saja, karena kami enggak mau terjebak dengan persoalan yang lainnya," tutupnya. (ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



asubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa.

POLISI LANJUTKAN PENYELIDIKAN KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN BALITA OLEH ART

BALIKPAPAN - Kasus kekerasan terhadap bayi 9 bulan berinisial KC yang dilakukan oleh asisten rumah tangga (ART) masih dalam tahap penyelidikan kepolisian di Polda Kaltim. Dan kasus ini sendiri tengah ditangani langsung di Subdit Renakta Polda Kaltim.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa mengatakan, pihaknya telah menjemput terlapor, RI di Mamuju, Sulawesi Barat beberapa waktu lalu.

"Itu awalnya hari Rabu dilaporkan berkaitan kekerasan terhadap anak," ujarnya Rabu (11/10/2023).

Musliadi menjelaskan, bahwa pihaknya masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan status RI sebagai tersangka. Dalam hal ini baru proses penyelidikan untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Pasalnya, dia menilai bahwa alat bukti yang didapat saat ini hanya rekaman CCTV, dan tidak ada keterangan-keterangan lain.

"Dalam hal ini tidak ada saksi yang langsung melihat bahwa yang terlapor itu lakukan adalah kekerasan terhadap anak itu," jelasnya.

Musliadi menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa saksi ahli berdasarkan salinan rekaman CCTV untuk menentukan apakah tindakan RI terhadap KC dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Disinggung soal hasil visum, dirinya membenarkan bahwa memang juga ada pemeriksaan visum. Namun ini belum bisa benar-benar

membuktikan terjadi penganiayaan.

"Diduga belum ada kekerasan dari hasilnya. Hanya ada lecet di situ. Kita belum tahu apakah lecet ini karena perlakuan terlapor atau bukan," tambah Musliadi.

Sebab itu dirinya menekankan pentingnya pemeriksaan saksi ahli dari Kementerian PPA dan KPAI untuk memastikan adanya perbuatan kekerasan.

"Sejauh ini sudah ada sekitar 3 saksi dari pihak korban. Pihak korban dalam hal ini ada satu pembantunya dan baby sisternya termasuk kedua orang tua korban," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan, jika nantinya sudah mendapat keterangan saksi ahli, kemudian pihaknya akan menggelar perkara untuk kepentingan penyidikan.

Diberitakan sebelumnya, Seorang asisten rumah tangga (ART) di Balikpapan, Kalimantan Timur, diduga menganiaya balita KC 9 bulan, terekam kamera pengawas dan video tersebut menjadi viral.

Awalnya orang tua korban tidak curiga terhadap ART dan memasang kamera pengawas untuk memantau anak mereka. Kejadian kekerasan terhadap anak terjadi pada 25 September 2023. Setelah mengetahui kejadian tersebut, orang tua langsung melaporkan ART ke polisi. ART yang berinisial RI diduga melarikan diri, dan Ayah korban pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat, untuk memburunya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



KOMPAK BISNIS SABU, PASUTRI DI PASER MASUK BUI

**GAET PEGIAT MEDIA SOSIAL DALAM
PENGAWASAN PEMILU 2024**



KOMPAK BISNIS SABU, PASUTRI DI PASER MASUK BUI

PASER- Pasangan suami istri (Pasutri) berinisial masing-masing MT (48) dan SK (41) warga Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, dibekuk jajaran Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Kepolisian Resort (Polres) Paser, Senin (9/10/2023).

Keduanya ditangkap setelah terbukti melakukan peredaran narkotika jenis sabu berdasarkan laporan masyarakat yang diselidiki Satresnarkoba Polres Paser dan Kepolisian Sektor (Polsek) Kuaro di sebuah rumah milik para pelaku.

Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi menyatakan, penyelidikan ini terungkap setelah petugas menggerebek rumah pelaku. Hal ini dilakukan setelah diketahui bahwa kedua pelaku diduga sering melakukan transaksi sabu dirumahnya.

"Bersama anggota gabungan segera melakukan pengerobekan dan mengamankan pasutri tersebut untuk dilakukan interogasi dan pengeledahan badan serta ruangan tertutup lainnya di rumah tersebut," kata AKP Suradi, Rabu (11/10/2023).

Dari hasil pengeledahan, lanjut Suradi, petugas menemukan 8 paket sabu seberat 32 gram. Selain itu, 1 unit timbangan digital, 3 lembar tisu, 1 buah sendok takar, 1 buah dompet timbangan, 4 bundel plastik berbagai ukuran, 2 unit telepon genggam dan 2 unit CCTV.

"Kami temukan 2 unit CCTV itu lantaran digunakan para pelaku untuk memantau aktivitas diluar rumah melakukan transaksi sabu," jelasnya.

Daei sederet barang bukti itu, akhirnya petugas mengamankan keduanya ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan sementara dari para tersangka, mereka mengaku telah menjalani bisnis tersebut selama 1 tahun.



Para tersangka beserta barang bukti

"Mereka sudah 1 tahun melakukan bisnis tersebut dan saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui dari mana para tersangka mendapatkan barang haram tersebut," ujarnya.

Akibatnya, kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka

dan terancam pasal 114 Ayat 2 juncto pasal 132 Ayat 1 subsider pasal 112 Ayat 2 juncto pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Iskandar Zulkarnain

BULAN INI, MULYANI DIPASTIKAN JADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASER

PASER - Personel Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser telah dipastikan bakal terjadi pergantian. Hal itu berdasarkan hasil perubahan rapat Badan Musyawarah (Banmus) terhadap jadwal kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Paser.

Dalam jadwal Banmus itu, dijadwalkan terselenggara rapat paripurna pengucapan sumpah janji Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Paser, sisa masa jabatan 2019-2024 dari yang sebelumnya dijabat Umar kepada Mulyani, Senin (24/10/2023) mendatang.

Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Iskandar Zulkarnain menyebut, pihaknya sudah menerima pengajuan dari

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Paser dan telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

"Telah disetujui oleh Gubernur pada 25 September 2023 kemarin. Sehingga Umar sejak adanya penetapan itu, segala hak yang melekat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paser telah dicabut," kata Zulkarnain, Rabu (11/10/2023).

Lebih lanjut, Zulkarnain menyatakan, pihaknya juga sudah menerima hasil putusan dari Gubernur Kaltim, di tanggal yang sama terhadap pengganti Anggota DPRD Kabupaten Paser untuk melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

"Kami juga sudah menyerahkan

kan ke Banmus untuk menentukan jadwal pelantikannya," lanjutnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya Umar merupakan Anggota DPRD Kabupaten Paser yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Paser. Proses PAW terjadi setelah dirinya memilih pindah ke Partai Golongan Karya (Golkar) untuk kembali bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Adapun ketentuan seluruhnya diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Paser, Fauzan.

GAET PEGIAT MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN PEMILU 2024

PASER - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser berencana menggaet pegiat media sosial (Medsos) dalam rangka pengawasan Pemilu 2024 mendatang.

"Sebenarnya kami sudah pernah pikirkan untuk itu, ada satu influencer dari Paser," kata Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Paser, Fauzan, Selasa (10/10/2023).

Untuk pengawasan partisipatif dengan melibatkan pegiat media sosial diterangkannya masih sebatas rencana. Pasalnya, sampai saat ini belum dilakukan pembicaraan langsung di internal Bawaslu Kabupaten Paser.

"Kami takutnya masih ada hal lain seperti terkait pendanaan dan sebagainya. Kita belum ke sana, cuma sudah ada rancangan dan mau dikomunikasikan,"

terangnya usai sosialisasi peningkatan peran kehumasan di salah satu hotel di Kabupaten Paser.

Sementara perihal adanya informasi yang diketahui dari media sosial, dituturkan Fauzan ketika terdapat informasi perlu adanya kejelasan, mulai identitas hingga deskripsi kejadian bagaimana.

Ia mencontohkan seperti kasus beberapa waktu lalu yang ramai di Twitter, yakni adanya Bacalon DPD diduga memanfaatkan wewenang, dirinya menyebut tidak bisa menjadi bentuk informasi awal.

"Karena kalau sudah informasi awal menurut regulasi itu harus ada identitasnya, siapa orangnya. Tetapi kami klarifikasi ke pemilik akun tidak mau mereka menunjukkan siapa dirinya," jelasnya.

Lanjut Fauzan, sehingga untuk prosesnya karena itu han-

ya sebagai bentuk informasi, bukan informasi awal, Bawaslu Kabupaten Paser melakukan penelusuran. "Setelah kami telusuri juga tidak menemukan siapa yang memberikan informasi itu. Artinya syarat untuk menjadi informasi awal dalam bentuk si penyampai informasi itu tidak terpenuhi," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi peningkatan peran kehumasan dalam rangka pengawasan pemilu tahun 2024 melalui media sosial, Bawaslu Kabupaten Paser akan lebih aktif lagi penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai platform media. Selain itu merespon cepat adanya komentar atau direct message terkait informasi yang diterima di media sosial.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



MALING GASAK MOTOR PARKIR DI RUMAH KOS, LANGSUNG DIBEKUK POLSEK SUNGAI PINANG

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



MALING GASAK MOTOR PARKIR DI RUMAH KOS, LANGSUNG DIBEKUK POLSEK SUNGAI PINANG

SAMARINDA - Jajaran Unit Opsnal Reskrim Polsek Sungai Pinang respon cepat laporan masyarakat dan berhasil ungkap kasus curanmor dalam kurun waktu 2x24 jam, pada Selasa (10/10).

Kasus ini terjadi pada Sabtu (7/10) dini hari, korban J kehilangan sepeda motornya yang diparkirkan di teras kamar kos di sekitar Jalan Elang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.

Kapolsek Sungai Pinang, Kopol Ahmad Abdullah mengungkapkan, korban tidak sengaja meninggalkan kunci sepeda motornya menempel di motor saat parkir.

"Hal ini dilihat oleh tersangka R menjadi sebuah peluang untuk menguntungkannya dirinya sendiri," terang Kapolsek dalam keterangan persnya, Rabu (11/10).

Awalnya tersangka R mengambil kunci motor yang menempel tersebut. Kemudian ter-

sangka R mengambil gambar motor Honda Scoopy di internet dan diunggah di aplikasi jual beli online dengan harga Rp. 2 juta hingga diminati oleh calon pembeli berinisial MH.

"Setelah muncul kesepakatan dengan calon pembeli, selanjutnya R mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik korban dan menjualnya kepada MH di sekitar Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Harapan Baru dengan harga Rp 2 juta tanpa surat - surat," jelas Kapolsek.

Sehari berselang, lanjut Kapolsek, Personel Polsek Sungai Pinang berhasil mengetahui keberadaan MH serta motor korban dan langsung melakukan upaya penangkapan terhadap MH di depan sebuah swalayan sekitar Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Harapan Baru.

"Personel kemudian melakukan pengembangan dan berha-

sil mengamankan R pelaku utama pencurian pada hari Senin malam," lanjutnya.

Kedua orang tersangka dan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, 1 buah kunci serta 1 unit telepon genggam telah diamankan di Polsek Sungai Pinang. Tersangka R dijerat dengan Pasal 363 tentang pencurian dan tersangka MH dijerat pasal 480 tentang penadahan.

"Dalam kurun waktu kurang dari 2x24 Jam personel kami berhasil ungkap pencurian sepeda motor. Ini merupakan bentuk respon cepat kami terhadap laporan dari masyarakat. Diimbau kembali kepada seluruh masyarakat agar tidak meninggalkan kunci pada kontak saat kendaraan diparkir. Mengunci ganda kendaraannya dan meletakkan di tempat yang dipastikan aman," tutup Kapolsek. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari

LAGI, POLRESTA SAMARINDA TANGKAP 2 PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SAMARINDA - Jangan Lewatkan! Pekan Raya Pegadaian 2023 akan digelar serentak di seluruh Kantor Wilayah Pegadaian Indonesia mulai 13 hingga 15 Oktober 2023.

Untuk Kantor Wilayah IV Balikpapan, yang mencakup seluruh Kalimantan, Pekan Raya Pegadaian digelar di Atrium Bigmall Samarinda.

Apa yang bisa dinikmati di Pekan Raya Pegadaian? Ketua Pelaksana Pekan Raya Pegadaian 2023, Yan Gustian, menjelaskan banyak sekali kegiatan yang bisa dinikmati di acara Pekan Pegadaian yang berlangsung selama 3 hari.

Acara ini gratis untuk semua orang dan akan dipandu oleh MC Vanesa dan Ardha. Selain itu, warga juga akan diajak menikmati penampilan dari Pound Fit, serta penampilan istimewa dari bintang tamu, Brisia Jodie. Tidak hanya itu, ada pula penampilan seru dari Geara Band.

Pekan Raya Pegadaian juga akan menjadi tempat berkumpulnya puluhan UMKM GadePreneur, yang akan menampilkan produk-produk mereka. "Bazar UMKM ini akan menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung selama pelaksanaan Pekan Raya," tutur Yan Gustian.

Selain itu, ada juga talkshow yang informatif, tebus murah sembako, dan penyerahan hadiah Pegadaian Poin yang sangat dinantikan.

"Untuk talk show, kami akan



Pekan Raya Pegadaian 2023 Siap Digelar 3 Hari di Big Mall Samarinda, Hadirkan Brisia Jodie, Bazar UMKM, hingga Tebus Murah Sembako

mengundang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang akan diadakan pada hari Jumat. Mereka juga telah mengonfirmasi kehadirannya," tambah Yan.

Bagi pecinta emas, dapat mengikuti bazar lelang emas, dan mencuci emas secara gratis sambil menikmati hiburan live music.

Tidak hanya itu, acara ini juga akan menampilkan jajanan kulin-

er lezat, berbagai perlombaan menarik, kuis seru, dan beragam games yang menghibur. The Gade Coffee & Gold Galeri juga akan memanjakan penikmat kopi.

Jangan lupa untuk ikut dalam undian doorprize yang menarik dan bergabung dalam Pegadaian Got Talent. "Saat ini persiapannya sudah mencapai 80-90 persen," pungkas Yan. (adv)



OK! TOBER

Deluxe Room

ONLY

~~Rp 698.000,-~~**30% OFF**

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs**BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com